



ANALISIS PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN BULOVA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

* Onesimus Sampebua¹, Mithen Lullulangi², Nuranny Taufieq³, Nur Alfiansah⁴

¹²³⁴ Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar

E-mail: *onesimus.sampebua@unm.ac.id¹, mithen@unm.ac.id², nurannytaufieq@unm.ac.id³,
noue_alfiansyah@yahoo.com⁴

ABSTRACT

This research is a survey research, which aims to analyze the slums of fishermen's settlements in Bulova Village. The research variables are: Road network, solid waste, and environmental sanitation. Data collection is done by observation and documentation. Data analysis techniques with qualitative analysis, discussion / efforts to overcome, and draw conclusions. The results showed that the quality of the environmental road network, solid waste, and environmental sanitation in the fishing settlements of RT 008 RW 002, Bulova Village, was very poor and included in the heavy slum category. The efforts to improve the quality of the residential environment are: 1) improving and managing the coast, improving roads according to feasibility standards, 2) managing waste and increasing public knowledge with the 3R method ((Reduce, Recycle, Reuse), and 3) conducting construction and maintenance of drainage networks, with a closed system, and construction of toilet facilities (MCK) connected to a septic tank with a communal system.

Keywords : Settlements, Roads, Solid Waste, Sanitation, Environment.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yang bertujuan untuk menganalisis permukiman kumuh permukiman nelayan di Desa Bulova. Variabel penelitian adalah: Jaringan jalan, persampahan, dan sanitasi lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis kualitatif, pembahasan/usaha mengatasi, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas jaringan jalan lingkungan, persampahan, dan sanitasi lingkungan di permukiman nelayan RT 008 RW 002 Desa Bulova sangat buruk dan termasuk dalam kategori kumuh berat. Upaya peningkatan kualitas lingkungan pemukiman adalah: 1) perbaikan dan pengelolaan pantai, perbaikan jalan sesuai standar kelayakan, 2) pengelolaan sampah dan peningkatan pengetahuan masyarakat dengan metode 3R ((Reduce, Recycle, Reuse), dan 3) melakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase, dengan sistem tertutup, dan pembangunan fasilitas jamban (MCK) yang terhubung dengan septic tank dengan sistem komunal.

Kata Kunci : Permukiman, Jalan, Sampah, Sanitasi, Lingkungan.

PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang tidak lepas dari permasalahan permukiman kumuh. Kota Makassar memiliki total kawasan kumuh 739,83 ha yang tersebar hampir di semua kawasan kumuh di Kota Makassar. Perkembangan dan pertumbuhan Kota Makassar yang cukup pesat memperlihatkan hasil yang positif juga menimbulkan masalah-masalah bagi pemerintah daerah, misalnya kondisi perumahan yang belum memenuhi standar dan syarat kesehatan, banjir yang terjadi setiap tahun, pengelolaan sampah yang belum baik, dan masalah-masalah lain yang merupakan dampak hasil pembangunan (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016).

Perkembangan kota Makassar sangat dinamis membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat. Perkembangan pusat kota yang merupakan sentra dari kegiatan ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat membawa pengaruh bagi tingginya arus tenaga kerja baik dari dalam kota maupun dari luar wilayah kota, sehingga menyebabkan tingginya arus urbanisasi. Surtiani, (2006) mengatakan, urbanisasi telah menyebabkan ledakan jumlah penduduk kota yang sangat pesat, salah satu implikasinya adalah terjadi penumpukan tenaga kerja di kota-kota besar di Indonesia.

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih banyak di jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Sebagai contoh, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota. Istikasari dan Khadiyanto, (2014), menjelaskan bahwa masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2011). Wijaya, (2016) mengatakan bahwa kawasan permukiman kumuh perkotaan timbul sebagai salah satu dampak kurang berhasilnya pembangunan permukiman di perkotaan dan keterbatasan lahan perkotaan.

Kusumawardhani, (2011) menjelaskan, kumuh atau slum memiliki pengertian tidak beraturan, tidak terawat dan kotor. Jadi permukiman kumuh adalah suatu tatanan ruang yang tidak beraturan, tidak terawat dan kotor yang mengakomodasi ruang daur hidup manusia. Untuk pengertian lebih jauh, kumuh atau slum adalah suatu daerah yang diperbolehkan oleh penguasa setempat untuk dibangun hunian. Berbeda dengan pengertian squatter areas yang berarti suatu daerah umum atau milik pemerintah yang tidak diperbolehkan untuk dihuni, sehingga squatter areas ini dikenal sebagai permukiman kumuh yang liar. Lebih lanjut Menurut Kusumawardhani, (2011) mengatakan, permukiman kumuh dapat digolongkan menjadi dua yaitu permukiman kumuh yang legal dan permukiman kumuh yang illegal. Permukiman kumuh yang legal berarti permukiman kumuh yang mempunyai kepemilikan yang jelas atas tanah dan bangunan. Permukiman kumuh jenis ini disebut juga slum. Slum merupakan daerah di perkotaan dengan kepadatan tinggi ditandai oleh bangunan yang kualitasnya tidak baik, tidak sehat, terdapat masalah kemiskinan dan kehidupan sosial yang tidak teratur di lingkungan itu.

Menurut Suparlan, (1995) Ciri-ciri permukiman kumuh; a) fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai; b) kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin; c) adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemerawutan tata ruang; d) ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008, permukiman dapat dikatakan kumuh apabila mencakup beberapa variabel diantaranya yaitu: 1) Permukiman tidak layak huni atau membahayakan kehidupan penghuni baik berupa keamanan maupun dari sisi kesehatan dan 2) Permukiman yang memiliki lingkungan tidak memadai dengan tingkat kenyamanan dan keamanan bangunan yang rendah. Dengan ciri-ciri, tidak sesuai dengan tata ruang (ilegal), kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan rendah, serta sarana dan prasarana lingkungan yang rendah. Wardhana dan Sulistyarso, (2015) menjelaskan, penyebab adanya permukiman kumuh adalah karakter bangunan yaitu umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat, serta karakter lingkungan yaitu tidak ada ruang terbuka hijau (open space) dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga, kepadatan penduduk yang tinggi, sarana prasarana yang tidak terencana dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey, bertujuan untuk menganalisis permukiman nelayan yang kumuh di Kelurahan Buloa, dilanjutkan dengan action research yaitu memberi konsep perbaikan dan upaya penanggulangan. Variabel penelitian adalah: Jaringan jalan, persampahan, dan sanitasi lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Fokus lokasi penelitian dalam wilayah Kecamatan Tallo yang warganya bertempat tinggal di permukiman kumuh adalah Kelurahan Buloa. Kondisi fisik Kelurahan Buloa, memiliki topografi yang relatif datar terletak di Tepi laut dan masuk dalam daerah aliran sungai (DAS) Tallo. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah penduduk Kelurahan Buloa, = 8.092 jiwa (PBS 2020). Yang mendiami 6 Rukun Warga (RW). Kemudian penduduk yang bermukim di kawasan yang paling kumuh adalah penduduk RW 2, sebanyak 1553 Jiwa.

Adapun kondisi fisik wilayah Kelurahan Buloa berdasarkan hasil survey, sebagai berikut:

1. Jaringan jalan.

Berdasarkan hasil survey, panjang jaringan jalan lingkungan di di wilayah penelitian yaitu RW 002, sepanjang 609 km, dan khusus di perkampungan nelayan (RT.008), sepanjang 54 km dengan kondisi yang masih rusak dan juga dalam bentuk jalan kayu yang menghubungkan rumah penduduk.



Gambar 1. Kondisi jalan lingkungan di Kelurahan Buloa

Sumber: Hasil Survey

Dari 132 kepala keluarga sebahagian diantaranya yang membuat rumah panggung di wilayah perairan, sehingga jaringan jalan untuk menghubungkan rumah-rumah mereka berupa jembatan kayu, namun kondisinya rusak seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Jalan Lingkungan Yang Menggunakan Kayu
Sumber: Hasil Survey

2. Persampahan

Kesadaran masyarakat yang bermukim di wilayah perairan tentang kebersihan lingkungan, tergolong rendah sehingga mereka masih membuang sampah di sembarang tempat. Akibatnya, kondisi permukiman mereka menjadi kumuh akibat sampah yang berserakan di mana-mana. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Kondisi sampah di Belakang Pemukiman
Sumber: Hasil Survey

Bukan hanya di belakang rumah, tetapi samping rumah yang merupakan celah antara satu rumah dengan rumah yang lain, juga terlihat sampah berserakan seperti gambar berikut.



Gambar 4. Sampah berserakan di samping rumah
Sumber: Hasil Survey

Hasil survey yang diperlihatkan pada gambar 4 dan 5 di atas, memperlihatkan betapa kumuhnya lingkungan perumahan di RW 002, khususnya RT.008 sebagai permukiman nelayan.

3. Sanitasi Lingkungan.

Sanitasi lingkungan yang dimaksudkan di sini, terdiri atas: 1) drainase lingkungan, 2) sumber air bersih, 3) aliran listrik, dan 4) sistem pembuangan tinja.

1) Drainase Lingkungan

Kondisi jaringan drainase lingkungan di Kelurahan Buloa secara keseluruhan terintegrasi dengan jaringan drainase kota. Namun pada RW 002 kawasan permukiman kumuh khususnya RT 008 yang merupakan perkampungan nelayan, kondisi drainase lingkungannya sangat buruk, termasuk wilayah darat yang ditempati penduduk. (Gambar 6) tetapi untuk wilayah perairan sama sekali tidak ada drainase lingkungan, karena hampir semua bangunan di lokasi tersebut didirikan di atas laut.



Gambar 5. Jalan setapak tanpa drainase di wilayah darat RT.008

Sumber: Hasil survey



Gambar 6. Permukiman di atas perairan tanpa drainase di RT.008

Sumber: Hasil survey

Sistem pembuangan air limbah rumah tangga di wilayah darat, secara langsung dialirkan ke saluran - saluran drainase, yang juga berperan sebagai wadah pembuangan limbah rumah tangga. Kondisi drainase yang tidak layak menyebabkan tidak berfungsinya drainase tersebut. Selain itu, apabila hujan turun dalam waktu yang cukup lama, air akan meluap dan masuk ke permukiman warga. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas lingkungan harus disertai dengan upaya pembangunan drainase lingkungan yang baik.

2) Sumber air bersih

Menyangkut sumber air bersih di wilayah penelitian, khususnya di RW.002 sumber air bersih telah dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan sebagian warga juga mempergunakan sumur bor sehingga sarana air bersih sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk.

3) Sistem pembuangan tinja

Berdasarkan hasil survey, dari 132 buah rumah yang ada di RT 008 RW 002 Kelurahan Buloa, terdapat 116 buah rumah atau 88% yang memiliki kamar mandi dan toilet lengkap dengan septictank, dan 16 buah rumah atau 12 % yang sama sekali tidak memiliki kamar mandi dan toilet, dan lebih memilih untuk memanfaatkan sungai maupun laut sekitar tempat tinggal untuk buang air sehingga terjadi pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan tidak bisa dihindari, mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapatkan bahwa kondisi lingkungan yang sangat kumuh di Kelurahan Buloa, terdapat di wilayah pesisir pantai yaitu di RW. 02. Hasil penelitian ini didukung oleh Hatibu et al (2019).

Untuk memberi solusi, konsep perbaikan yang ditawarkan sesuai hasil penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Jaringan Jalan dan Pantai

Memperbaiki serta menata jalan yang ada dipermukiman kumuh khususnya wilayah darat, sesuai standar kelayakan dengan memberikan beberapa ornamen jalan baik yang bersifat pasif ataupun masif. Hal ini dapat dilakukan, dengan memberi lapisan pengerasan dengan hard material, misalnya dari paving blok, kemudian di sekitar rumah penduduk dilengkapi dengan pot bunga untuk menanam berbagai jenis bunga, sehingga suasana lingkungan menjadi hijau dan indah dipandang. Konsep ini dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Usulan konsep perbaikan jalan lingkungan sisi darat
Sumber: Hasil Penelitian

Kemudian konsep untuk jalan penghubung antar perumahan di wilayah perairan, sebaiknya jembatan kayu yang sudah rusak diperbaiki pada sisi kiri maupun sisi kanan sungai yang menjadi habitat nelayan, sehingga jalan penghubung tersebut sekaligus sebagai tambatan perahu. (Gambar 8).



Gambar 8. Usulan konsep perbaikan jalan lingkungan sisi perairan
Sumber: Hasil Penelitian

Untuk jalanan di pinggir laut sebaiknya dilengkapi dengan jalur hijau serta di sepanjang jalan disediakan tempat duduk atau spot di pinggir laut sehingga dapat menjadi vokal view yang menarik untuk objek wisata serta menjadi tempat tahanan perahu yang berada di pesisir laut. Selain itu, wilayah perairan yang kosong khususnya di celah-celah perumahan, sebaiknya ditanami pohon bakau sebagai penghijauan pantai, agar lingkungan yang kumuh berubah menjadi kawasan yang hijau.



Gambar 9. Usulan konsep perbaikan lingkungan pantai dengan tanaman mangrove
Sumber: Hasil Penelitian

2. Konsep Persampahan

Sampah yang berserakan di lingkungan kumuh permukiman nelayan khususnya di RT 008, sebaiknya dibersihkan sambil mendidik warga masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Oleh sebab itu, perlu adanya management sampah yang baik. Tahap awal masyarakat harus diberi pemahaman tentang 3 R (Gambar 10)



Gambar 10. 3 R (Reduce, Recycle, dan Reuse)

Sumber: google.co.id

Untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu adanya pemberdayaan masyarakat mengelola sampah, utamanya memilah sampah organik yang dapat diolah menjadi pupuk kompos, yang dapat mereka manfaatkan menambah penghasilan, khususnya menjadi kegiatan bagi ibu-ibu rumah tangga sambil menunggu suami yang sementara melaut untuk mencari ikan. Kemudian memisahkan sampah tidak dapat didaur ulang, Pemerintah setempat perlu menyiapkan tempat pembuangan sementara (TPS) di sekitar permukiman nelayan, serta ada petugas dari Pemerintah kota yang bertugas mengangkut sampah yang tidak dapat di reuse ke tempat pembuangan akhir (TPA).

3. Konsep Sanitasi Lingkungan

Menyangkut sanitasi lingkungan, ada tiga hal yang menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu drainase lingkungan, distribusi air bersih, dan sistem pembuangan tinja. Menyangkut distribusi air bersih, tidak akan dibahas lagi karna dianggap sudah baik sehingga hanya dua indikator yang hendak dibahas, yaitu:

1) Sistem drainase lingkungan

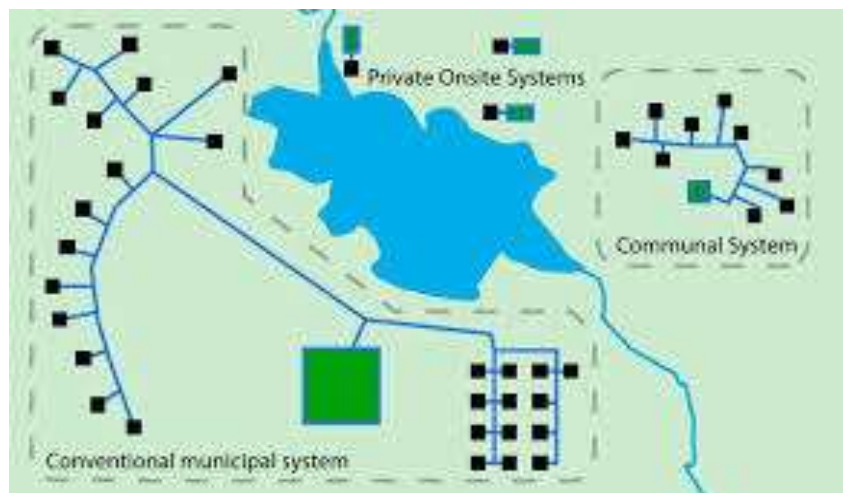
Kelemahan sistem drainase yang ada khususnya di sisi darat, adalah kebersihannya yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Agar hal ini tidak terulang, perlu diperbaiki dengan sistem drainase tertutup seperti pada gambar 11.



Gambar 11. Usulan sistem drainase tertutup
Sumber: Hasil Penelitian

2) Sistem pembuangan tinja

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa wilayah sisi darat yang dihuni 88 % penduduk RT. 008, semua rumah warga telah memiliki toilet permanen yang lengkap dengan septictank. Yang menjadi persoalan adalah 12% penduduk yang tidak memiliki toilet, dan juga tidak dapat membuat toilet masing-masing, mengingat mereka bermukim di wilayah perairan. Sehingga untuk kelompok ini, diusulkan untuk mempergunakan toilet sistem komunal, yaitu tiap-tiap rumah dibuatkan toilet, kemudian dihubungkan dengan pipa ke septictank induk seperti gambar 12.



Gambar 12. Skema Sistem Komunal
Sumber: www.google.co.id

Secara detail struktur, tiap rumah dibuatkan kloset dan dihubungkan dengan pipa ke septictank induk, walaupun septictank induk dapat saja dibangun di darat seperti pada gambar 13 berikut ini.



Gambar 13. Septictank induk dibangun di darat dan dihubungkan dengan pipa dengan kloset yang ada masing-masing rumah di perairan.

Sumber: Hasil Penelitian

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan luaran berupa hasil survey terhadap kondisi wilayah di kelurahan Buloa, dan mendapatkan bahwa wilayah yang paling kumuh adalah di RW 02, yang dihuni oleh penduduk sebanyak 1553 Jiwa, dengan kondisi jalan yang sangat jelek dan berlumpur pada musim hujan, sampah dibuang di sembarang tempat sehingga pesisir pantai sangat kotor dan kumuh, dan sanitasi lingkungan utamanya sistem drainase yang sangat buruk, serta sistem pembuangan tinja yang sangat tidak layak. Olehnya itu, diberi konsep perbaikan yang ditawarkan sesuai hasil penelitian di atas, berupa perbaikan jaringan jalan dan penghijauan pantai, usulan konsep pembuangan sampah dengan menerapkan konsep 3 R, dan konsep sanitasi lingkungan khususnya perbaikan drainase dan sistem pembuangan tinja secara komunal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2020). *Kecamatan Tallo Dalam Angka 2018 / 2019*. Makassar.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Slum Improvement Action Plan (SIAP) tentang Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh*. Makassar.
- Hadiyanto. (2014). *Komunikasi Pembangunan Perspektif Modernisasi*. Bogor: IPB Press.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2011). *Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 tentang Perumahan dan Permukiman*. Jakarta.
- Kusumawardhani, C. (2011). *Karakteristik Fisik Permukiman Kumuh Di Perkotaan Berdasarkan Tipologi Penataan (Studi Kasus : Menteng Atas Dan Kampung Melayu)*. Program Studi Arsitektur Teknik Arsitektur. Universitas Indonesia. Depok.

- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun (2008) *tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota*.
- Sulistyarso, Haryo dan Wardana, Nizar Harsya (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, Kota Surabaya*. Journal Teknik ITS. Vo.4 No.2 (2015). <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/11013>
- Suparlan, S. (1995). *Kemiskinan di Perkotaan*. Sinar Harapan dan Yayasan Obor, Jakarta.
- Surtiani, E. E. (2006). *Faktor - faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga)*. Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wijaya, D. W. (2016). *Perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh studi penentuan kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan pemukiman kumuh di Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 2 (1): 1-10.
- Hatibu, H. Amal, dan Maru R. (2019). *Analysis of Environmental Quality of Settlements in Buloa Village of Tallo Subdistric in Makassar City*. <http://eprints.unm.ac.id/13060/1/JURNAL.pdf>